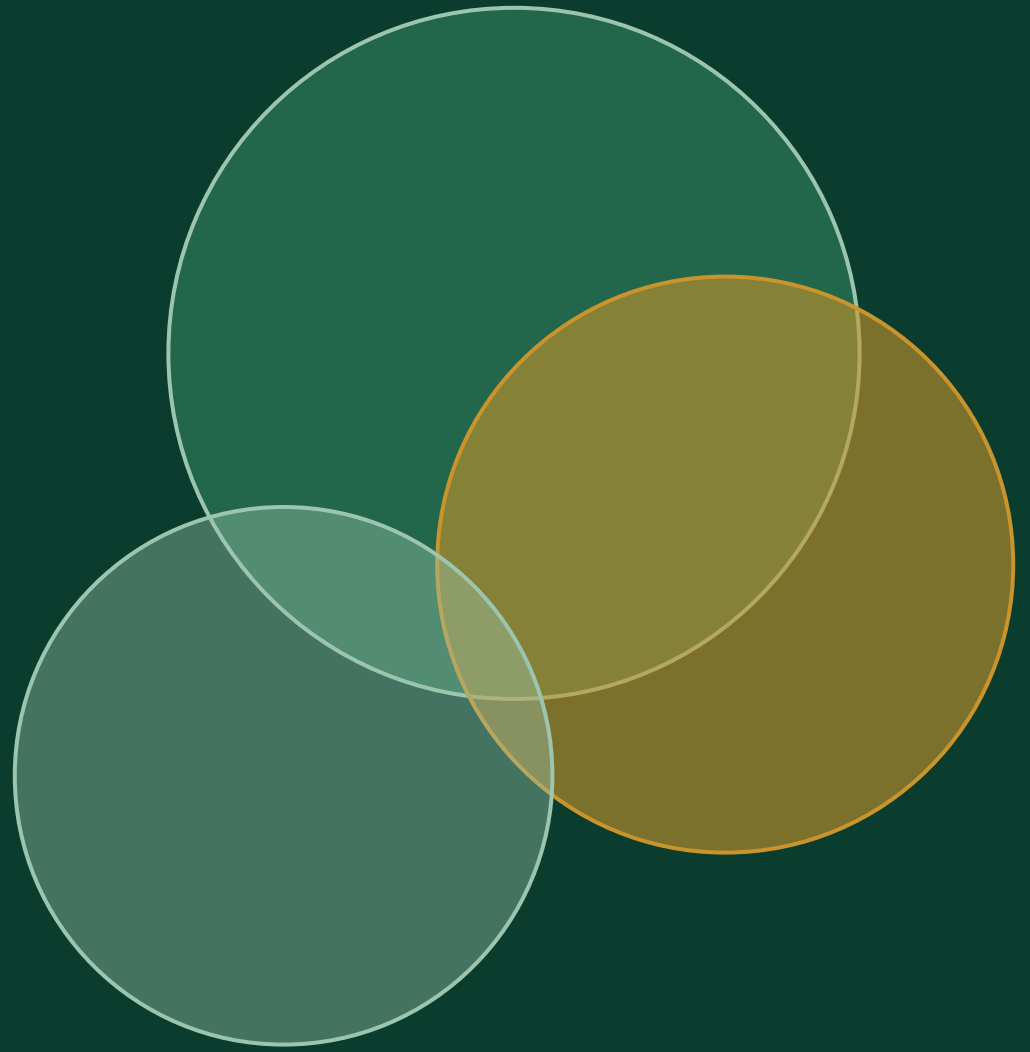
MAKALAH SEMINAR

Koalisi Multipartai dan Efektivitas Fungsi DPR



Dr. Benny K. Harman, SH

Anggota DPR RI · Fraksi Partai Demokrat · Anggota Komisi III DPR RI

Forum Seminar Komisi Ilmu Sosial – Akademi Ilmu Pengetahuan (AIPI)
Jakarta, 20 Oktober 2026

Pendahuluan

1. Koalisi: bagian penting membangun dukungan politik bagi pemerintahan
2. Fragmentasi partai di DPR: dukungan parlemen tetap diperlukan
3. Dua sisi: stabilitas politik versus otonomi dan pengawasan DPR
4. Tesis: koalisi besar tidak harus melumpuhkan fungsi DPR

DATA PENTING

2009–2010

Kasus Bank Century

DPR tetap menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintah

"…koalisi yang luas tidak dengan sendirinya melumpuhkan DPR."

Rumusan Masalah

1

PENGARUH

Bagaimana koalisi multipartai memengaruhi efektivitas fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR?

2

KONDISI

Kondisi apa yang memungkinkan koalisi besar tetap kompatibel dengan demokrasi?

3

LANGKAH

Langkah kelembagaan dan politik apa yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan akuntabilitas kekuasaan?

Pendekatan konstitusional dan analisis politik kelembagaan — analitis dan reflektif, bukan penelitian empiris kuantitatif

Kerangka Konstitusional dan Teoretis

- Presiden dan DPR memperoleh legitimasi melalui mekanisme yang berbeda
- Hubungan antarlembaga yang saling mengimbangi, bukan atasan dan bawahan
- Koalisi memperlancar hubungan, namun tidak boleh menggantikan fungsi konstitusional DPR
- Ukuran koalisi berbeda dari kualitas pengelolaannya: lihat perilaku kelembagaan

UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pasal 20	Pembentukan undang-undang
Pasal 20A	Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan
Pasal 23	APBN dalam kerangka persetujuan DPR

“Kesepakatan politik merupakan instrumen pemerintahan; konstitusi tetap menjadi dasar dan batas penggunaan kekuasaan.”

Dampak Koalisi terhadap Fungsi DPR

Legislasi

- Persetujuan politik mudah, namun belum tentu berkualitas
- Perlu pembahasan bermakna dan partisipasi masyarakat

Anggaran

- Koalisi besar mempermudah persetujuan APBN
- Risiko: pembahasan menjadi prosedur formal

Pengawasan

- Hak angket Bank Century 2009–2010
- Dukungan mayoritas tidak sepenuhnya menutup ruang pengawasan

EMPAT PILAR EFEKTIVITAS DPR

1. Otonomi partai dan fraksi
2. Ruang bagi mandat representatif anggota DPR
3. Kualitas proses pengambilan keputusan
4. Integritas dan tindak lanjut pengawasan

Agenda Penguatan DPR dan Tata Kelola Koalisi

1 **Membangun koalisi berbasis program**
Berorientasi pada program dan visi pembangunan, bukan sekadar pembagian jabatan

2 **Memperkuat demokrasi internal partai**
Kritik konstruktif adalah penguatan institusi, bukan pembangkangan politik

3 **Meningkatkan standar kualitas legislasi dan anggaran**
Impact assessment, keterbukaan dokumen, partisipasi bermakna, evaluasi hasil program

KUTIPAN PENTING

"...anggota Parpol dalam koalisi mendukung program dan visi Presiden bukan mendukung apalagi menjadi subordinasi Parpol yang pimpinannya menjadi Presiden."

Agenda Penguatan DPR dan Tata Kelola Koalisi

LANGKAH 4

Mengoptimalkan hak-hak konstitusional secara proporsional

- Digunakan bertanggung jawab, berbasis data, dan ditindaklanjuti secara nyata
- Bukan instrumen konflik partisan, namun tidak dilemahkan hanya karena pemerintah bermayoritas
- Kriteria utama: kepentingan publik, kepatuhan pada hukum, akuntabilitas kekuasaan

LANGKAH 5

Menjaga etika politik

- Menjaga jarak fungsional antara kepemimpinan partai dan pengelolaan pemerintahan
- Pimpinan tertinggi partai tidak merangkap menteri: konvensi etika atau kesepakatan politik
- Bukan larangan konstitusional yang saat ini sudah berlaku

Agenda ini tidak bertujuan memperkecil koalisi secara artifisial, melainkan memastikan bahwa berapa pun ukuran koalisi, DPR tetap menjalankan mandatnya.

Penutup: Stabilitas Seiring Akuntabilitas

1. Koalisi berbasis program
2. Demokrasi internal partai
3. Kualitas legislasi dan anggaran
4. Hak konstitusional proporsional
5. Etika politik

Pemerintahan yang efektif membutuhkan dukungan politik

Demokrasi yang sehat membutuhkan parlemen yang mampu menilai penggunaan kekuasaan secara independen

“Langkah-langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk melemahkan arti penting stabilitas politik melainkan untuk memastikan bahwa stabilitas tersebut berjalan seiring dengan prinsip akuntabilitas demokratis.”

Kesimpulan

1 RUMUSAN

Koalisi besar tidak dengan sendirinya melumpuhkan fungsi DPR
Ukuran koalisi bukan satu-satunya penentu kualitas demokrasi dan efektivitas parlemen

2 RUMUSAN

Kuncinya pada tata kelola koalisi
Otonomi partai dan fraksi, mutu legislasi dan penganggaran, serta keberanian menggunakan instrumen pengawasan secara konstitusional dan bertanggung jawab

3 RUMUSAN

Stabilitas dan efektivitas DPR saling memperkuat
Stabilitas yang disertai mekanisme koreksi memiliki dasar demokratis yang lebih kuat daripada keseragaman sikap politik

DATA PENTING

70%

koalisi gemuk yang menopang pemerintah

Hak angket Bank Century menunjukkan pengawasan parlemen masih dapat berlangsung

Implikasi Praktis bagi Demokrasi Presidensial

Geser pertanyaan
Dari besar atau kecilnya koalisi, menuju: bagaimana dukungan kepada presiden tetap sejalan dengan kemandirian DPR?

Kelola koalisi
Perkuat tata kelola koalisi serta otonomi partai dan fraksi

Tingkatkan mutu proses
Legislasi dan penganggaran berbasis argumentasi, data, dan partisipasi yang bermakna

Berani mengawasi
Gunakan instrumen pengawasan secara konstitusional dan bertanggung jawab

Ukuran keberhasilan: kekuasaan dapat dijalankan secara efektif tanpa kehilangan akuntabilitas

> *Koalisi harus menjadi instrumen stabilitas pemerintahan, bukan instrumen penundukan parlemen.*

Pemerintah harus mampu bekerja

DPR harus mampu mengawasi

Keduanya harus tunduk pada konstitusi serta kepentingan rakyat

Terima kasih

Dr. Benny K. Harman, SH · Anggota DPR RI